

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Transparansi

a. Konsep Transparansi

Di bidang keuangan publik, Pasal 7 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik mengatur bahwa “badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada kewenangannya kepada pemohon informasi publik sesuai, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Badan publik wajib memberikan informasi publik tentang pelaporan keuangan yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan melalui penggunaan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pelaporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Artinya, laporan keuangan yang dihasilkan juga harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Sementara itu, menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menginformasikan bahwa keuangan daerah, meliputi: (1) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota; (2) Neraca daerah; (3) Laporan arus kas; (4) Catatan laporan keuangan daerah; (5) Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; (6) Laporan keuangan perusahaan daerah; (7) Data terkait kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sistem yang

transparan memiliki prosedur pengambilan keputusan publik yang jelas, jalur komunikasi yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, dan kemudahan akses ke sumber informasi,transparansi didasarkan pada kebebasan akses terhadap informasi. Proses dan informasi kelembagaan secara tersedia, terutama bagi pihak yang berkepentingan.

Coryanata, (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau. Anggaran manajemen dianggap transparan jika memenuhi kriteria berikut: 1) kebijakan anggaran diumumkan; 2) dokumen anggaran diumumkan; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu; 4) menyelaraskan suara/usulan orang; dan 5) tersedia sistem informasi publik.

Ningrum, (2010) Transparansi adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan memiliki kriteria; adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kerja.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan transparansi negara, media massa memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai saran berkomunikasi dengan publik dan menjelaskan berbagai informasi yang relevan, maupun sebagai

pemerhati berbagai Tindakan negara dan abnormalitas fungsi mesin birokrasi. Untuk mewujudkan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers, sehingga dengan kebebasan pers, media terbebas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh kepentingan komersial (Wiranto, 2012). Konsekuensi dari keterbukaan ini adalah kontrol masyarakat yang berlebihan, oleh karena itu keterbukaan itu sendiri juga harus ada batasnya, dalam hal ini pemerintah harus mencari tahu dengan baik informai apa yang harus diungkapkan dan informasi apa yang tidak boleh diungkapkan. Bahwa pihak berwenang memiliki kriteria yang jelas tentang informasi apa yang dapat diberikan dan kepada siapa informasi itu diberikan. Ini diperlukan untuk mencegah semua informasi menjadi publik. Ada alasan mengapa informasi ini mungkin tidak tersedia untuk umum.

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Pasaribu, (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses perumusan dan pelaksanaanya, serta hasilyang dicapai.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) meliputi 2 aspek, sebagai berikut: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukan auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Selain itu, anggaran yang disusun oleh penyelenggaraan bersifat transparan jika memenuhi kriteria: 1) kebijakan anggaran dipublikasikan, 2) dokumen anggaran tersedia dan mudah diakses, 3) tersedia laporan pelaporan tepat waktu, 4) suara/ saran masyarakat tersedia. Dipertimbangkan, 5) ada sistem pemberitahuan publik. Asumsinya adalah semakin transparan suatu kebijakan publik, dalam hal ini APBN, maka semakin besar pula kontrol yang dilakukan dewan, karena masyarakat juga turut serta mengontrol kebijakan publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut; 1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, 3)

publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintahan daerah, 4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintahan daerah kepada pihak ketiga, 5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmanurrasjid, 2018)

c. Indikator Transparansi

Menurut Rahmanurrasjid, (2018) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator yaitu: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan Tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

d. Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ranah keuangan publik, UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Tanjung, (2014) mengatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Asas keterbukaan (transparansi) penyelenggaraan pemerintah daerah adalah keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia individu, kelompok dan rahasia negara. Pelaksanaan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan provinsi secara benar, adil dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan tanggap terhadap keinginan dan kepentingan masyarakat. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal transparansi, untuk mencapainya dewan harus mengelola kegiatannya dengan baik, dengan memperhatikan dua aspek transparansi, yaitu: 1) komunikasi publik dewan dan 2) hak publik atas informasi. Transparansi harus seimbang, termasuk kebutuhan akan kerahasiaan informasi yang mempengaruhi institusi dan privasi.

2. Akuntabilitas

a. Konsep Akuntabilitas

Akbar, (2012) Mengatakan bahwa akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) accountability for probity and legality; 2) process accountability; 3) performance accountability; 4) programme accountability; dan 5) policy accountability. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum.

Sementara itu, Sulistiyani, (2018) pemerintah yang akuntabel adalah pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat dan akurat, kepada masyarakat (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembagunan dan pemerintahan. (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Lukito, (2014) Pada dasarnya, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. M. B. A. Mardiasmo, (2021) Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Prinsip akuntabilitas publik yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma tersebut (Loina, 2013)

b. Indikator Akuntabilitas

Beberapa indikator tanggung jawab dapat diklasifikasikan di antara konsep tanggung jawab tersebut di atas, yaitu: 1) tahapan proses pengambilan keputusan meliputi: keputusan harus diformalkan secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga negara yang membutuhkannya; standar dan nilai etika yang berlaku diikuti saat membuat keputusan; tujuan politik yang ditetapkan jelas dan sesuai dengan visi dan misi organisasi dan standar saat ini; adanya mekanisme untuk memastikan kebutuhan terhadap standar; koherensi dan kelayakan tujuan operasional yang

ditetapkan dan prioritas dalam mencapai tujuan tersebut. 2) dalam sosialisasi kebijakan meliputi: penyebaran informasi tentang keputusan melalui media massa, nonmedia massa dan sarana komunikasi personal; ketepatan dan kelengkapan informasi tentang metode yang digunakan untuk mencapai tujuan program; akses publik terhadap informasi tentang keputusan setelah dibuat mekanisme banding publik; dan ketersediaan sistem informasi pemerintah serta hasil pemantauan yang dicapai oleh pemerintah.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Impikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangeable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012). Konsep tanggung jawab di Indonesia bukanlah hal yang baru, hampir semua instansi dan Lembaga pemerintahan menekankan konsep tanggung jawab ini terutama dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Fenomena ini berawal dari tuntutan masyarakat yang Kembali dikumandangkan pada awal masa reformasi tahun 1998. Tuntutan masyarakat tersebut muncul dari kenyataan bahwa konsep tanggung jawab tidak dapat diterapkan secara konsisten di era orde baru di semua negara. Garis pemerintahan yang akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan memprovokasi berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan ekonomi dan administrasi publik Indonesia.

3. Kinerja

a. Konsep Kinerja

Menurut Mahsun & Sulistyowati, n.d. (2015) kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi Bastian, (2010). Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Untuk memahami konsep kinerja organisasi publik, dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif ini saling berinteraksi, karena pemahaman tentang konsep kinerja organisasi publik sangat terkait dengan lingkungan di mana organisasi publik beroperasi dan berkembang. Dalam konteks organisasi publik, kinerja terkait dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta pemerataan pelayanan. Dalam melihat kinerja organisasi publik daerah, sering kali dikaitkan dengan penggunaan anggaran. Konsep ini dikenal sebagai “kinerja dalam perhitungan keuangan efisien” (*performance in terms of the monetary calculus of efficiency*) M. B. A. Mardiasmo, (2021)

b. Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan permenpan No. 25 tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dessler, (2009) mendefinikan penilain kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Penilain kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Model penilain kinerja yang dicontohkan oleh Dessler, (2009) meliputi indikator sebagai berikut: 1) kualitas kerja adalah akurasi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan; 2) produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu; 3) pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan; 4) bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas; 5) kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan; dan 6) kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan.

Mahsun & Sulistyowati, n.d. (2015) mengatakan penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Setiap unit organisasi memiliki indikator yang berbeda-beda, yang berbeda-beda tergantung pada jenis layanan yang yang diberikan. Untuk menentukan indikator kerja, beberapa komponen yang perlu di perimbangkan adalah sebagai berikut: 1) biaya layanan (cost of service); 2) penggunaan (utilization) 3) kualitas dan standar layanan (quality and standards); 4) cakupan layanan (coverage)

c. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut definisi yang dikemukakan oleh MenPAN pada tahun 2007, kinerja instansi pemerintah merujuk pada sejauh mana sasaran dan tujuan instansi pemerintah telah dicapai, yang didasarkan pada visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Hal ini mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rossieta, (2014) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalanya sistem pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan pembagunan daerah. Meningkatkan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk menerapkan otonomi daerah dan mencapai desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Melakukan perencanaan dan pengeluaran

yang fokus pada kinerja akan berkontribusi pada peningkatan kinerja anggaran daerah.

Pendapat para ahli mengenai kinerja pemerintah daerah sangat beragam, terutama terkait dengan definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, penting untuk memiliki alat yang dapat mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar terhindar dari praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketidakpastian hukum dan stabilitas politik, serta kebingungan terkait arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas. Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang melibatkan indikator kinerja dan target kinerja. Selain itu, juga penting untuk melakukan pelaporan kinerja dan memiliki mekanisme penghargaan dan hukuman. Indikator pengukuran kinerja yang baik memiliki karakteristik yang relevan, jelas, hemat biaya, dan sederhana. Indikator tersebut juga berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan adanya masalah yang membutuhkan Tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

1. Elkha & Wahidahwati, (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak dari pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

Sebagai responden. Sampel penelitian ini diperoleh melalui metode purposive sampling, dan sebanyak 130 responden terpilih. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, dan dari 130 kuesioner yang dibagikan, satu kuesioner hilang dan tidak dapat digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 21 (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal, sehingga mencapai tujuan organisasi pemerintah dalam memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti benar.

2. Suwandi, (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD pemerintah kota Padang). Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. 2) pengaruh desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode total sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan statistical package for social science (SPSS).

Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $3,369 > 1,656$ (H_1 diterima). 2) desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,419 > 1,656$ (H_2 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) perlunya pemisahan tugas yang jelas dari pelaksanaan anggaran untuk menghindari adanya peran ganda pada masing-masing staf, sehingga dapat berkurangnya peristiwa kecurangan dalam melaksanakan tugas. 2) untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas publik untuk menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan datang.

3. Khikmah & Purwanto, (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan karena melihat pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang menunjukkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang semakin baik namun kasus korupsi di pemerintah daerah terus meningkat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif dengan metode Pengumpulan data yang dilakukan dengan data sekunder. Sumber data transparansi di peroleh dari website masing-masing pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa dalam tiga tahun terakhir. Data akuntabilitas diperoleh dari data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang dipublikasikan oleh BPK RI. Data kewajaran diperoleh dari opini yang dikeluarkan oleh BPK RI perwakilan masing-masing daerah melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pencegahan korupsi pemerintah daerah diperoleh berdasarkan kasus korupsi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang diperoleh dari KPK RI. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria (purposive sampling), sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai sensus. Sebanyak 357 sampel dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel transparansi, akuntabilitas, dan keadilan berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Jadi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan belum mampu menjadi faktor pencegahan korupsi pemerintah daerah.

4. Ulya & Astuti, (2020) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kab tegal, camat dan lurah kab tegal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi anggota legislatif daerah terhadap transparansi dan

akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penilaian persepsi didasarkan pada indikator yang mencerminkan kondisi yang transparan dan akuntabel. Sampel diambil dari populasi keseluruhan dengan pertimbangan yang relatif kecil (kurang dari 100) maka semua perubahan dapat di ambil sebagai populasi keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh rekapitulasi dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Alur analisis dimulai dari ujian data kualitatif dan berlanjut ke uji asumsi klasik dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Damayanti & Hermanto, (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 20 SKPD di kota Surabaya, dan jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner untuk variabel akuntabilitas dan transparansi diadopsi dari penelitian Sopanah dan Isa (2010), kuesioner untuk variabel pengendalian internal diadopsi dari penelitian Aristanti et al. (2011) dan kuesioner untuk variabel kinerja pemerintah daerah diadopsi dari penelitian

Sumarno (2005). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah di SKPD kota Surabaya. Temuan ini didukung oleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 80,2%, yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja pemerintah di SKPD kota Surabaya. Sisanya sebesar 19,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi tersebut.

6. Lestari U, (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, good governance terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus OPD Kabupaten Kendal). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan good governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Populasi yang diteliti meliputi semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan keuangan di kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan good governance secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara individual, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah

Daerah. Transparansi juga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Good Governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

7. Jitmau et al., (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris di kabupaten sorong). Dalam mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik, diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern yang efektif. Hal ini bertujuan agar kinerja pemerintah daerah memiliki kualitas yang memuaskan. Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, manajemen kinerja yang efektif juga diperlukan. Implementasi aturan perundang-undangan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat meningkat.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, diperlukan fungsi pemeriksaan intern yang berperan penting dalam melakukan evaluasi independen terhadap kegiatan organisasi. Fungsi pemeriksaan intern ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang berasal dari

10 satuan kerja perangkat daerah di pemerintah kabupaten Sorong. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda, dengan menguji validitas data, reliabilitas data, asumsi klasik, dan hipotesis. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Services Solution (SPSS) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sorong. Namun, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sorong.

8. Riswanto, (2016) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten jember. Fokus penelitian ini adalah pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada responden sebagai instrument. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, serta Koefisien Determinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten jember, yang berarti semakin baiknya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah kabupaten jember.

9. Umar et al., (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat aceh. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Kantor Inspektorat Aceh. Fokus penelitian ini adalah pada transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini mencapai 42 responden. Data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang menggunakan skala likert sebagai satuan pengukuran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas dan transparansi secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja kantor inspektorat aceh. Secara individual, akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi tersebut, dengan nilai koefisien 0,155. Sementara itu, transparansi juga memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap kinerja para auditor di kantor inspektorat Aceh, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh para auditor memiliki dampak yang nyata dalam meningkatkan kinerja Kantor Inspektorat Aceh.
10. Gultom L, (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam

penelitian ini, sampel terdiri dari 98 orang yang terdiri dari pejabat/Aparatur Penggunaan Anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, dan pejabat penatausaha keuangan. Dari jumlah tersebut, 52 orang berasal dari kabupaten Dairi dan 46 orang berasal dari kabupaten Pakpak Bharat. Data primer digunakan dalam penelitian ini, dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan baik secara online maupun offline. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, analisis data dilakukan menggunakan metode statistik yang sesuai. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis statistik PLS-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

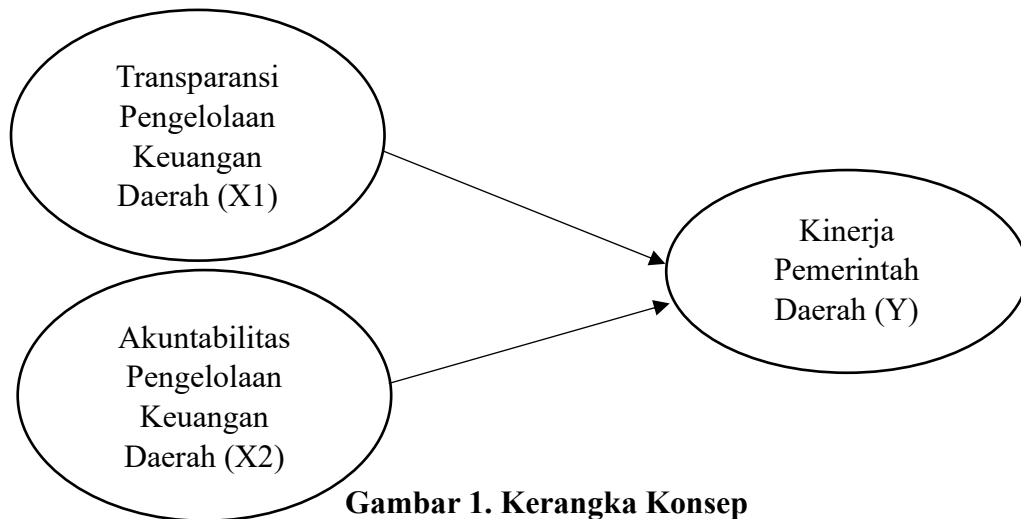
Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan pemahaman tentang hubungan antar variabel yang diteliti yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah: Transparansi berarti adanya keterbukaan yang nyata, menyeluruh, dan memberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik (Fahmi, 2017). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Auditya et al., (2013), Riswanto, (2016), Setiawan & Safri, (2016) telah membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang program pemerintah, sehingga praktik pemerintah dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Selain itu dengan adanya transparansi, diharapkan kualitas pelayanan publik juga semakin meningkat. Transparansi yang dilakukan dengan baik dan benar memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah secara umum dan khusus dapat meningkat sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah: Dalam praktik tata Kelola pemerintah yang baik, akuntabilitas menjadi elemen utama. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah dapat memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal. Akuntabilitas ini secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan, sehingga hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan stakeholder. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Dewi.R.T, (2015), Risakotta & Akbar, (2018), Azlina & Amelia, (2015). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam kesimpulan penelitian-penelitian tersebut,

dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan dengan baik, sesuai prosedur, dipertanggungjawabkan, dan diawasi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka fikir yang telah disusun, maka penulis dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.